

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU DI PERGURUAN TINGGI ISLAM

Bani¹

Abstrak: Islamic education at oftentimes Indonesian front with various problem that don't demulcent. One of about problem education that don't demulcent and faced by indonesian nation is its low quality on each ladder and satuan is education, notably elementary education and intermediate. About position and upgrade management importance at an Islamic college is that hereafter existence a college (Islamic college) doesn't particularly clings to government, but preferably clings to estimation stakeholders (college student, oldster, job the world, government, lecturer, supporter energy, and thes interested parties other parties) about Islamyang's college quality be evened out. That its existence is secured, therefore unlikely college shall upgrade at Islamic college that be evened out

Kata Kunci: Implementasi, Manajemen Peningkatan Mutu, Perguruan Tinggi Islam.

Pendahuluan

Pendidikan Islam di Indonesia seringkali berhadapan dengan berbagai masalah yang tidak ringan. Salah satu permasalahan pendidikan yang tidak ringan dan dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Rendahnya mutu pendidikan tersebut dapat diperhatikan pada hasil-hasil studi internasional yang selalu menempatkan pendidikan Indonesia dalam posisi "juru kunci". Hasil studi *The Third Internasional Mathematics and Science Study Repeat 1999 (TIMSS-R 1999)* yang dilaksanakan pada 38 negara dari lima benua, yaitu Asia, Australia, Afrika, Amerika dan Eropa menempatkan peserta didik SLTP Indonesia pada urutan ke 32 dan 34 untuk skor tes IPA dan Matematika. Peserta didik dari negara tetangga Singapura menduduki urutan yang pertama dan kedua untuk skor tes Matematika dan IPA. Indikator lain menunjukkan bahwa berdasarkan pada *Human Development Index (HDI)*, Indonesia berada pada urutan yang ke 102 dari 164 negara dan Indonesia masih

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember

berada di bawah Vietnam. Di samping itu, hasil studi *International Institute for Development* menempatkan Indonesia pada urutan ke 49 dari 49 negara.²

Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. *Pertama*, strategi pembangunan selama ini lebih bersifat *input oriented*. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. *Kedua*, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Dengan kata lain, bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.³

Dalam konteks pendidikan Islam, tujuan dan visi pendidikan Islam juga masih belum berhasil dirumuskan dengan baik. Tujuan pendidikan Islam seringkali diarahkan untuk menghasilkan manusia-manusia yang hanya menguasai ilmu Islam *an-sich*, dan visinya diarahkan untuk mewujudkan manusia yang *salih* dalam arti yang taat beribadah dan gemar beramal untuk tujuan akhirat. Akibat dari keadaan yang demikian ini, maka para lulusan pendidikan Islam hanya memiliki kesempatan dan peluang yang cukup terbatas, yaitu hanya sebagai pengawal moral bangsa.⁴ Mereka kurang mampu bersaing dan tidak mampu merebut peluang dan kesempatan yang tersedia dalam memasuki lapangan kerja, akibatnya lulusan pendidikan Islam semakin termarginalisasikan dan tidak berdaya.

²Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam: Di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: P. T. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 189-190

³Umaldi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Sebuah Pendekatan Baru dalam Pengelolaan Sekolah untuk Meningkatkan Mutu*, Internet/mbs/artiket pendidikan Network. Mbs. Htm. 1999)

⁴Dalam beberapa kasuistik, peran pendidikan Islam sebagai pengawal bangsa pun dipertanyakan. Hal ini disebabkan adanya fenomena di mana keadaan bangsa Indonesia yang mayoritas Islam tidak menunjukkan akhlakunya yang makin baik. Al-hasil, keadaan menunjukkan dimana moral dan akhlak masyarakat semakin mengkhawatirkan. Lihat: *Ibid.*, hal. 3

Tantangan lain yang akan dihadapi oleh perguruan tinggi Islam di masa depan adalah bagaimana perguruan tinggi Islam tersebut dapat menjawab berbagai problematika yang muncul di masyarakat akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika dilihat dari berbagai permasalahan tersebut perguruan tinggi Islam saat ini masih jauh dari harapan yang ideal sehingga dalam hal itu masih membutuhkan penanganan yang profesional dan serius untuk meningkatkan mutunya.

Sebagai suatu sistem yang dinamis, pendidikan tinggi Islam terus menerus mendapat sorotan dari masyarakat, pemerintah dan para *stake holders* disertai dengan munculnya masalah-masalah pendidikan yang semakin kompleks. Silang pendapat mengenai sistem pendidikan merupakan hal yang biasa, oleh karena proses pendidikan itu sendiri akan terus menerus berkembang sejalan dengan perubahan-perubahan konsep pendidikan karena peningkatan mutu ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mengenai posisi dan arti penting manajemen peningkatan mutu di suatu Perguruan Tinggi Islam adalah bahwa di masa mendatang eksistensi suatu perguruan tinggi (Perguruan Tinggi Islam) tidak semata-mata tergantung pada pemerintah, melainkan terutama tergantung pada penilaian *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan) tentang mutu Perguruan Tinggi Islam yang diselenggarakannya. Agar eksistensinya terjamin, maka perguruan tinggi miao tidak mau harus meningkatkan mutu di Perguruan Tinggi Islam yang diselenggarakannya.

Pembahasan

1. Definisi Mutu

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah "ukuran baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya), kualitas."⁵ Dalam bahasa Inggris, mutu diistilahkan dengan: "quality",⁶ sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan "juudah".⁷

Secara *terminology*, istilah mutu memiliki pengertian yang cukup beragam, mengandung banyak tafsir dan bertentangan. Hal ini

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Kedua), (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 677.

⁶Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, (Third Edition), (Jakarta: Modern English Press, 1987), hal. 1550.

⁷Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, (Edisi Lengkap), (Yogya: Mukti Karya Grafika, 2003), hal. 1043.

disebabkan karena tidak ada ukuran yang baku tentang mutu itu sendiri. Sehingga sulit kiranya untuk mendapatkan sebuah jawaban yang sama, apakah sesuatu itu bermutu atau tidak.

Mutu adalah konsep yang kompleks yang telah menjadi salah satu daya tarik dalam semua teori manajemen. Lyod Dobbins dan Crawford Mason telah mewawancarai banyak penulis mengenai mutu, dan mereka menyimpulkan bahwa "Tidak ada 2 orang yang berbicara dengan kami dapat menyetujui dengan tepat bagaimana mendefinisikan mutu". Mereka mengutip John Steward, seorang Konsultan di Mc. Kinsey "Tidak ada sebuah definisi mengenai mutu.... Mutu adalah perasaan menghargai bahwa sesuatu itu lebih baik daripada yang lain. Perasaan itu barulah sepanjang waktu, dan berubah dari generasi ke generasi, serta bervariasi dengan aspek aktifitas manusia." ⁸

Namun demikian, ada kriteria umum yang telah disepakati bahwa sesuatu itu dikatakan bermutu, ketika sesuatu itu bernilai baik atau mengandung makna yang baik. Sebaliknya sesuatu itu dikatakan tidak bermutu, bila sesuatu itu mempunyai nilai yang kurang baik, atau mengandung makna yang kurang baik.

Dalam konteks pendidikan, apabila seseorang mengatakan sekolah itu bermutu, maka bisa dimaknai bahwa lulusannya baik, gurunya baik, gedungnya baik, dan sebagainya. Sebaliknya seseorang akan mengatakan sekolah itu tidak bermutu, ketika lulusannya kurang baik, gurunya kurang baik, gedungnya kurang baik, dan sebagainya. Untuk menandai sesuatu itu bermutu atau tidak seseorang memberikan simbol-simbol dengan sebutan-sebutan tertentu, misalnya sekolah unggulan, sekolah teladan, sekolah percontohan dan lain sebagainya.

Menurut Pleffer dan Coote sebagaimana dikutip Aan Komariah, secara esensial istilah mutu menunjukkan kepada sesuatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang (*products*) dan/ atau kinerjanya.⁹ Menurut B. Suryobroto, konsep "mutu" mengandung pengertian makna derajat

⁸James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, and Daniel R. Gilbert, *Manajemen*, terj. Alexander Sindoro, (Jakarta: P. T. Bhuana Ilmu Populer, 1996), hal. 210

⁹Aan Komariah dan Cipi Triatna, *Visionary Leadership; Menuju Sekolah Efektif*, (Jakarta: P. T. Bumi Aksara, 2005), hal. 9.

(tingkat) keunggulan satu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* maupun *intangible*.¹⁰

Sebagaimana dikutip Amin Widjaja, Gregory B. Hutchins menyatakan bahwa mutu (*Quality*) adalah:

- a. kesesuaian/ kecocokan dengan spesifikasi dan standar yang berlaku;
- b. cocok/ pas untuk digunakan (*fitnes for use*);
- c. dapat memuaskan keinginan, kebutuhan dan pengharapan pelanggan dengan harga yang kompetitif.¹¹

Edward dan Sallis sebagaimana dikutip Sanusi¹² malah mengutip Pleffer dan Coote yang menyebut mutu sebagai konsep yang licik (*slippery concept*). Hal ini disebabkan istilah "bermutu", berkaitan dengan sudut pandang dan sudut kepentingan pengguna istilah yang berbeda-beda. Perbedaan terjadi, disebabkan oleh konsep mutu yang bertolak dari standar absolute (*absolute concept*) dan standar yang relatif (*relatif concept*).

Standar absolute beranggapan bahwa mutu memiliki ukuran nilai tertinggi, bersifat unik dan sangat berkaitan dengan ungkapan kebaikan (*goodness*), keindahan (*beauty*), kebenaran (*truth*) dan idealitas¹³. Biasanya mutu dalam ukuran absolut sudah ditetapkan produsen secara subjektif. Misalnya berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan produsen, suatu barang dinyatakan memiliki ukuran mutu baik maka konsumen akan mengikuti standar tersebut dan sangat bangga dengan barang yang dipakainya sebagai sesuatu yang prestisius. Sementara yang relatif bertolak dari pikiran bahwa mutu merupakan sesuatu yang "*not be expensive and exclusive.. may be beautiful but not necessarily so. They do not have to be special. They can be ordinary, commonplace, and familiar*".¹⁴

Alasan definisi relatif, berdasarkan pada kenyataan adanya perbedaan antara kepentingan subjek penghasil barang atau jasa dengan kepentingan pemakai barang atau jasa. Namun justru dalam

¹⁰B. Suryobroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 210.

¹¹Amin Widjaja Tunggal, *Audit Mutu (Quality Auditing)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 2

¹²Sanusi Uwes, *Manajemen Pengembangan Mutu Dosen*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 26

¹³Aan Komariyah dan Cipi Triatna, *Visionary Leadership*....., hal. 9.

¹⁴Edward and Sallis (1993: 23), sebagaimana dikutip *ibid*.

hal ini keanehannya. Saat subjek penghasil berorientasi pada kepentingan pemakai, para pemakai sendiri sendiri lebih berorientasi pada persepsinya.

Ukuran mutu yang absolut sulit diterapkan dalam dunia pendidikan dengan penilaian dari berbagai pihak dan manajemen jasa yang heterogen. Orang akan memandangnya dari berbagai arah dan semua arah atau aspek memiliki ukuran-ukuran mutu tertentu. Oleh karena itu, ukuran mutu harus diterapkan secara relatif, yaitu ditetapkan berdasarkan pelanggan. Dalam hal ini berarti bukan hanya produsen, tetapi pelanggan pun turut menentukan mutu itu. Dengan demikian, tolok ukur mutu yang baik bukan tolok ukur yang bersifat absolut, melainkan tolok ukur yang relatif yaitu yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

2. Konsep Mutu Perguruan Tinggi Islam.

Konsep mutu di atas pada dasarnya merupakan konsep yang lebih cenderung diperkenalkan dalam dunia manajemen usaha dan Industri (bisnis). Tetapi konsep ini bagi penulis amat fleksibel untuk diadopsi untuk kemudian diterapkan¹⁵ pada berbagai institusi besar atau kecil, termasuk dalam institusi Perguruan Tinggi Islam.

Dalam dunia Perguruan Tinggi Islam, dua pertanyaan pokok yang penting dikemukakan adalah, apa hasil Perguruan Tinggi Islam dan siapa pemakai hasil Perguruan Tinggi Islam tersebut? Hasil Perguruan Tinggi Islam berupa nilai tambah bagi subjek didik, memiliki tingkat kepentingan yang berbeda antara subjek didik itu sendiri sebagai pemakai utama hasil didikan, sebagai orang tua yang notabene sebagai pemakai kedua, pasar tenaga kerja yang notabene sebagai pemakai ketiga, dan dosen atau staf pendukung sebagai orang

¹⁵Secara umum, konsep-konsep yang ada dalam dunia manajemen pendidikan merupakan konsep yang notabene diperkenalkan lebih dulu dalam dunia manajemen umum. Salah satu konsep kontemporer yang mulai gencar didengungkan adalah *Quality Assurance* dan *Total Quality Management*. Bahkan TQM misalnya, sebagaimana dikutip Sagala merupakan konsep yang fleksibel untuk diadaptasi atau diterapkan dalam dunia pendidikan. Penerapan TQM pada institusi pendidikan memang memerlukan perubahan budaya, yaitu dari budaya bisnis semata menjadi budaya manajemen sumber daya manusia untuk menghasilkan manusia yang berkualitas. Lihat: Saiful Sagala, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat; Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*, (Jakarta: Nimas Multina, 2004), hal. 33 Lebih lanjut pengadopsian konsep ini juga terlihat pada bahasan *Quality Assurance* antara lain *Customer* (pelanggan), pelayanan, produk dan efisiensi. Muhaimin, *Manajemen Penjaminan Mutu di Universitas Islam Negeri Malang*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005), hal.9

yang terlibat dalam proses pendidikan yang justru “menggunakan” subjek didik itu sendiri.

Akar konsep Mutu Perguruan Tinggi Islam sendiri akan penulis pahami setelah mengejawantahkan makna “pendidikan Islam” secara umum. Hal ini dilakukan supaya dalam proses pembahasan mutu dan pelaksanaan penjaminan mutu tidak asal comot, ada perbedaan filosofis antara lembaga bisnis, lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan Islam.

Menurut Muhaimin, istilah “pendidikan Islam”¹⁶, dapat dipahami dalam beberapa perspektif, yaitu¹⁷:

- a. Pendidikan menurut Islam, atau pendidikan yang berdasarkan Islam, dan/atau sistem pendidikan yang Islami. Yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah (al-Hadis). Dalam pengertian yang pertama ini, pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut.

Dalam realitasnya, pendidikan yang dibangun dan dikembangkan dari kedua sumber dasar tersebut terdapat beberapa perspektif, yaitu: (1) pemikiran, teori dan praktik penyelenggaraannya melepaskan diri dan/atau kurang mempertimbangkan situasi konkret dinamika pergumulan masyarakat Muslim (era klasik dan kontemporer) yang mengitarinya; (2) pemikiran, teori dan praktik penyelenggaraannya mempertimbangkan pengalaman dan khazanah intelektual ulama klasik; (3) pemikiran, teori dan praktik penyelenggaraannya hanya mempertimbangkan situasi *socio- histories* dan cultural masyarakat kontemporer; (4) pemikiran, teori dan praktik

¹⁶“Pendidikan Islam” di sini harus kita bedakan dengan “Pendidikan Agama Islam”. Hal ini disebabkan pada realitas kontemporer yang me”mukul rata” dan meracukan pengertian keduanya. Kedua istilah ini dianggap sama, sehingga ketika seseorang berbicara tentang pendidikan Islam ternyata isinya terbatas pada pendidikan agama Islam. Dan sebaliknya, ketika seseorang berbicara tentang pendidikan agama Islam justru yang dibahas di dalamnya adalah tentang pendidikan Islam. Padahal kedua istilah itu memiliki substansi yang berbeda. Lebih jauh lihat: Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam*, hal. 6.

¹⁷Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal.

penyelenggaraannya mempertimbangkan pengalaman dan khazanah intelektual Muslim klasik serta mencermati situasi *socio-historis* dan kultural masyarakat kontemporer.

- b. Pendidikan ke-Islaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidihkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) seseorang. Dalam pengertian yang kedua ini dapat berwujud: (1) segenap kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membantu seseorang atau sekelompok peserta didik dalam menanamkan dan/atau menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya, yang diwujudkan dalam sikap hidup dan dikembangkan dalam ketrampilan hidupnya sehari-hari; (2) segenap fenomena atau peristiwa pertemuan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya dan atau tumbuh kembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak.
- c. Pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam. Dalam arti proses bertumbuhkembangnya Islam dan umatnya, baik Islam sebagai agama, ajaran maupun sistem budaya dan peradaban, sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Sampai sekarang. Jadi, dalam pengertian yang ketiga ini istilah "pendidikan Islam" dapat dipahami sebagai proses pembudayaan dan pewarisan ajaran agama, budaya dan peradaban umat Islam dari generasi ke generasi sepanjang sejarahnya.

Sungguhpun demikian, dari beberapa definisi tersebut intinya dapat dirumuskan sebagai berikut: "Pendidikan Islam" merupakan sistem pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan niat¹⁸

¹⁸Kata niat mengandung pengertian suatu usaha yang direncanakan dengan sungguh-sungguh, yang muncul dari hati yang bersih dan suci karena mengharap ridha-Nya, bukan karena *interes-interes* yang lain. Niat tersebut ditindaklanjuti dengan *mujahadah*, yakni berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan niat serta berusaha melakukan kebaikan atau konsisten dengan sesuatu yang direncanakan. Kemudian dilakukan *mahasabah*, yakni melakukan kontrol dan evaluasi terhadap rencana yang telah dilakukan. Jika berhasil dan konsisten dengan niat atau rencana semula, maka hendaklah bersyukur, serta berniat lagi untuk melaksanakan rencana-rencana berikutnya. Dan sebaliknya, jikalau gagal, atau kurang konsisten dengan rencana lama, maka ia bersegera *istighfar* atau *bertaubat* kepada-Nya sambil memohon pertolongan kepada-Nya agar diberi kekuatan dan kemampuan untuk mewujudkan niat atau rencana tersebut. Lihat:

untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kegiatan pendidikannya.

Lebih lanjut Muhaimin menambahkan bahwa jika ditilik dari aspek program dan praktik penyelenggaraannya, setidaknya pendidikan Islam dapat dikembangkan ke dalam lima jenis, yaitu (1) pendidikan pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, yang menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebut sebagai pendidikan keagamaan; (2) pendidikan madrasah, yang saat ini disebut sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam, dan pendidikan lanjutannya seperti IAIN/STAIN atau Universitas Islam Negeri yang bernaung di bawah Departemen Agama; (3) pendidikan umum yang ber"nafas"kan Islam, yang diselenggarakan oleh dan/atau berada di bawah naungan yayasan dan organisasi Islam; (4) pelajaran agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah saja; dan (5) pendidikan Islam dalam keluarga atau di tempat-tempat ibadah, dan/atau di forum-forum kajian keislaman, *majlis ta'lim*, dan institusi-institusi lainnya yang sekarang sedang digalakkan oleh masyarakat.¹⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga Perguruan Tinggi Islam merupakan lembaga pendidikan tinggi lanjutan yang diselenggarakan atau didirikan dengan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kegiatan pendidikannya. Sehingga hasil Perguruan Tinggi Islam yang berupa nilai tambah bagi subjek didik, memiliki tingkat kepentingan yang berbeda antara subjek didik itu sendiri sebagai pemakai utama hasil didikan, sebagai ortu sebagai pemakai kedua, pasar tenaga kerja sebagai pemakai ketiga, dan guru atau staf pendukung sebagai orang yang terlibat dalam proses pendidikan yang justru "menggunakan" subjek didik itu sendiri harus tidak terlepas dari tujuan di atas, yaitu untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kegiatan pendidikannya.

Sedangkan konsep mutu dengan rumusan yang jelas serta konkrit menjadi sebuah keharusan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Perguruan Tinggi Islam, walaupun diakui beberapa pakar pendidikan bahwa pembahasan tentang mutu dalam konteks pendidikan sulit didefinisikan dan difahami. Namun demikian, B.

Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam*, hal. 8-9

¹⁹Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum*i, hal. 9-10

Suryobroto memberikan batasan pengertian mutu dalam konteks pendidikan yang mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan.²⁰ Interpretasi yang lebih jelas dan operasional dari mutu pendidikan disampaikan oleh Depdiknas sebagai “*the capacity of school as an institution to provide and utilize educational resources effectively so as to improve learning capacity*”.²¹ Maksud dari pengertian ini diarahkan pada mutu lembaga pendidikan sebagai sebuah institusi yang harus memberikan dan memanfaatkan sumber-sumber pendidikan secara efektif sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran. Sumber-sumber dimaksud adalah seluruh komponen mulai dari input, proses pendidikan, komponen siswa, dan komponen hasil belajar (*learning outcomes*).

Secara sederhana, mutu suatu Perguruan Tinggi Islam bisa dilihat dari rumusan visi dan misinya, yang kemudian visi dan misi tersebut diwujudkan dalam proses pendidikan yang akan dilakukan. Menurut Muhaimin mutu Pendidikan Tinggi yang dimaksud adalah sebagai berikut: Kesesuaian dengan standar; Kesesuaian dengan harapan *stakeholders*, atau Pemenuhan janji yang telah diberikan.²²

Istilah mutu itu sendiri mengandung dua hal. Pertama sifat dan kedua taraf. Sifat adalah sesuatu yang menerangkan keadaan suatu benda, sedang taraf menunjukkan kedudukannya dalam suatu skala. Tiap manusia memiliki pandangan yang berbeda tentang sifat dan taraf tersebut. Demikian halnya terhadap sifat dan taraf mutu pendidikan. Terdapat deskripsi tentang sifat dan taraf yang berbeda. Deskripsi berdasarkan pendekatan ekonomi dengan penekanan pada relevansi keluaran pendidikan dengan lapangan kerja, yang ditampilkan melalui istilah-istilah “siap kerja”, “siap pakai”, dan “siap latih” akan berbeda dengan deskripsi yang memakai pendekatan intrinsik dan instrumental pendidikan. Pendekatan kedua ditampilkan melalui istilah-istilah sikap kepribadian dan kemampuan intelektual sesuai dengan tujuan pendidikan.

Namun demikian, seperti diuraikan sebelumnya bahwa istilah bermutu berkaitan dengan sudut pandang dan sudut kepentingan pengguna istilah yang berbeda-beda. Perbedaan ini terjadi oleh konsep

²⁰*Ibid.*

²¹Ministry of National Education, *Quality Improvement*, Website: [http://www.Pdd. Go. Id/ ministry](http://www.Pdd.Go.Id/ministry).

²²Muhaimin, *Manajemen Penjaminan Mutu di Universitas Islam Negeri Malang*, hal. 10

mutu yang bertolak dari standar absolute (*absolute concept*) dan standar yang relatif (*relatif concept*).

Ukuran mutu yang absolut sulit diterapkan dalam Perguruan Tinggi Islam, dengan penilaian dari berbagai pihak dan manajemen jasa yang heterogen. Orang akan memandangnya dari berbagai arah dan semua arah atau aspek memiliki ukuran-ukuran mutu tertentu.

Oleh karena itu, ukuran mutu Perguruan Tinggi Islam harus ditetapkan secara relatif, yaitu ditetapkan berdasarkan pelanggan (*customers*). Dalam hal ini berarti bukan hanya produsen (lembaga Perguruan Tinggi Islam sendiri), tetapi pelanggan pun turut menentukan mutu itu. Dengan demikian, tolok ukur mutu yang baik bukan tolok ukur yang bersifat absolut, melainkan tolok ukur yang relatif yaitu yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Mutu Perguruan Tinggi Islam akan baik jika Perguruan Tinggi Islam tersebut dapat menyajikan jasa yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggannya. Pelayanan atau jasa yang diberikan oleh lembaga Perguruan Tinggi Islam ini tentu harus berupa sesuatu yang bermutu, yang bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan (*customers*).

3. Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu di Perguruan Tinggi Islam

Sebagai lembaga Perguruan Tinggi Islam, STAIN, IAIN, Universitas Islam Negeri yang bernaung di bawah Departemen Agama dan PTAIS, juga sering berhadapan dengan berbagai masalah pendidikan yang tidak ringan. Salah satu permasalahan yang juga menjadi masalah pendidikan bangsa Indonesia²³ adalah rendahnya mutu Perguruan Tinggi Islam.

²³Rendahnya mutu pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pada setiap jenjang dan satuan pendidikannya, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Rendahnya mutu pendidikan tersebut dapat diperhatikan pada hasil-hasil studi internasional yang selalu menempatkan pendidikan Indonesia dalam posisi "juru kunci". Hasil studi *The Third International Mathematics and Science Study Repeat 1999* (TIMSS-R 1999) yang dilaksanakan pada 38 negara dari lima benua, yaitu Asia, Australia, Afrika, Amerika dan Eropa menempatkan peserta didik SLTP Indonesia pada urutan ke 32 dan 34 untuk skor tes IPA dan Matematika. Peserta didik dari negara tetangga Singapura menduduki urutan yang pertama dan kedua untuk skor tes Matematika dan IPA. Indikator lain menunjukkan bahwa berdasarkan pada *Human Development Index* (HDI), Indonesia berada pada urutan yang ke 102 dari 164 negara dan Indonesia masih berada di bawah Vietnam. Di samping itu, hasil studi *International Institute for Development* menempatkan Indonesia pada urutan ke 49 dari 49 negara. Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam: Di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi Islam*, (Jakarta: P. T. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 189-190.

Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. *Pertama*, strategi pembangunan selama ini lebih bersifat *input oriented*. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa jikalau semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (termasuk Perguruan Tinggi Islam) akan dapat menghasilkan *output* (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. *Kedua*, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat *makro* (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat *mikro* (sekolah). Dengan kata lain, bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.²⁴

Abdur Rahman Shaleh menyatakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan menurun dan mengalami perkembangan yang tidak merata. *Pertama*, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan *educational production function* atau *input-output* yang dilaksanakan secara tidak konsekuen. *Kedua*, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratis-sentralistik, sehingga menempatkan sekolah (termasuk Perguruan Tinggi Islam) sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang panjang dan kadangkala kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah (Perguruan Tinggi Islam) setempat. *Ketiga*, peran serta masyarakat khususnya orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini pada umumnya lebih bersifat dukungan *input* (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas).²⁵

²⁴Umaldi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Sebuah Pendekatan Baru dalam Pengelolaan Sekolah untuk Meningkatkan Mutu*, Internet/mbs/artiket pendidikan Network. Mbs. Htm. 1999).

²⁵Abdur Rahman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, (Jakarta: P. T. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 243-244

Visi, misi dan tujuan Perguruan Tinggi Islam pun juga masih belum berhasil dirumuskan dengan baik. Tujuan Perguruan Tinggi Islam seringkali diarahkan untuk menghasilkan manusia-manusia yang hanya menguasai ilmu Islam *an-sich*, dan visinya diarahkan untuk mewujudkan manusia yang *salih* dalam arti yang taat beribadah dan gemar beramal untuk tujuan akhirat. Akibat dari keadaan yang demikian ini, maka para lulusan Perguruan Tinggi Islam hanya memiliki kesempatan dan peluang yang cukup terbatas, yaitu hanya sebagai pengawal moral bangsa.²⁶ Mereka kurang mampu bersaing dan tidak mampu merebut peluang dan kesempatan yang tersedia dalam memasuki lapangan kerja, akibatnya lulusan Perguruan Tinggi Islam semakin termarginalisasikan dan tidak berdaya.²⁷

Perguruan Tinggi Islam yang bermutu adalah Perguruan Tinggi Islam yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, skill dan tingkah laku yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, yang secara menyeluruh disebut sebagai kecakapan hidup (*life skill*). Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang bermutu, baik *quality in fact* maupun *quality in perception*.²⁸ Untuk dapat meningkatkan mutu Perguruan Tinggi Islam, maka Perguruan Tinggi Islam harus dapat melaksanakan pengelolaan yang didasarkan pada peningkatan mutu Perguruan Tinggi Islam.

²⁶Dalam beberapa kasuistik, peran pendidikan Islam sebagai pengawal bangsa pun dipertanyakan. Hal ini disebabkan adanya fenomena di mana keadaan bangsa Indonesia yang mayoritas Islam tidak menunjukkan akhlakunya yang makin baik. Al-hasil, keadaan menunjukkan dimana moral dan akhlak masyarakat semakin mengkhawatirkan. Lihat: *Ibid.*, hal. 3

²⁷Meskipun tidak setiap mereka (Mahasiswa) yang masuk dan belajar di Perguruan Tinggi Islam selalu didasari oleh motivasi "nafkah" atau demi "kepentingan ekonomi" di kemudian harinya, namun tidak bisa disangkal adanya keterkaitan antara dunia pendidikan dengan cita-cita lapangan kerja dan kehidupan sejahtera bagi alumni dan tamatannya. Sedemikian erat hubungan tersebut, sehingga besar kecilnya animo calon mahasiswa yang berminat dan mendaftarkan diri ke sebuah Perguruan Tinggi Islam tertentu, sebagian didasari oleh cerah tidaknya masa depan mereka dalam hal lapangan kerja yang bakal diperoleh setelah menyelesaikan studi. Lebih jauh lihat: Imam Bawani, *Pasar Kerja Alumni Perguruan Tinggi Islam Islam*, Makalah disampaikan dalam Seminar Mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Tulungagung tahun 2005.

²⁸H. Suderajat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Bandung: CV. Cipta Cekas Grafika, 2005), hal. 17

Aplikasi dari manajemen peningkatan mutu terhadap Perguruan Tinggi Islam didasarkan atas pemikiran bahwa para administrator dan manajer Perguruan Tinggi Islam (Rektor, Dekan, Ketua) perlu menemukan kerangka kerja yang muncul dari dalam Perguruan Tinggi Islam itu yang diperkirakan dapat menopang mutu dan kinerja Perguruan Tinggi Islam yang menjadi tanggung jawab mereka. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, Bennet mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar tentang mutu yaitu:²⁹ (1) definisi kualitas lebih mengacu pada konsumen, bukan pada pemasok, (2) konsumen adalah seseorang yang memperoleh produk atau layanan, seperti mereka yang secara internal dan eksternal terkait dengan organisasi dan bukannya yang hanya menjadi "pembeli" atau "pembayar", (3) mutu harus mencukupi persyaratan kebutuhan dan standar, (4) mutu dicapai dengan mencegah kerja yang tidak memenuhi standar, bukannya dengan melacak kegagalan melainkan dengan peningkatan layanan dan produk yang terus menerus, (5) peningkatan mutu dikendalikan oleh manajemen tingkat senior, namun semua yang terlibat di dalam organisasi harus ikut bertanggung jawab, mutu harus dibangun di dalam setiap proses, (6) mutu diukur melalui proses statistik, anggaran mutu adalah anggaran biaya yang tidak disesuaikan dengan tuntutan persyaratan, sehingga terjadi kesenjangan antara dua penyerahan barang, (7) alat yang paling ampuh untuk menjamin terjalannya mutu adalah kerjasama (tim) yang efektif, dan (8) pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang fundamental terhadap organisasi yang bermutu.

Peningkatan mutu harus bertumpu pada lembaga pendidikan untuk secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasinya guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan peserta didik dan *stakeholders*. Dalam manajemen peningkatan mutu terkandung upaya: (1) mengendalikan proses yang berlangsung di lembaga pendidikan baik kurikuler maupun administrasi, (2) melibatkan proses diagnose dan proses tindakan untuk menindaklanjuti diagnose, (3) peningkatan mutu harus didasarkan atas data dan kata, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, (4) peningkatan mutu harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan, (5) peningkatan mutu harus

²⁹N. Bennet, M. Crawford & C. Riches, *Managing in Education: Individual and Organization Perspectives*, (London: Paul Chapman Publishing Co., 1992), hal. 56

memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada dalam lembaga pendidikan, dan (6) peningkatan mutu memiliki tujuan yang menyatakan bahwa sekolah atau madrasah dapat memberikan kepuasan kepada peserta didik, orang tua dan masyarakat.³⁰

Untuk memahami hakekat dari manajemen peningkatan mutu dalam pendidikan, perlu melihat perbandingan antara karakteristik manajemen tradisional dengan manajemen peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini setidaknya terdapat sepuluh karakteristik yang membedakannya sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1: Komparasi antara Manajemen Tradisional dan Manajemen Peningkatan Mutu³¹

Manajemen Tradisional	Manajemen Peningkatan Mutu
1. Mencari pemecahan secara "cepat-cepat".	1. Mengadopsi filosofi manajemen modern.
2. Menggunakan metode "pemadaman kebakaran".	2. Menggunakan metode terstruktur dan pengoperasian yang disiplin.
3. Mengadopsi upaya peningkatan secara acak.	3. Memberi contoh melalui kepemimpinan.
4. Mengoperasikan dengan cara lama.	4. Menggunakan "terobosan berfikir" dengan inovasi baru.
5. Menfokuskan pada jangka pendek.	5. Menekankan pada peningkatan berkelanjutan jangka panjang.
6. Memeriksa kesalahan.	6. Mencegah kesalahan dan menekankan kualitas desain.
7. Menentukan penggunaan opini.	7. Menentukan penggunaan fakta.
8. Menempatkan sumber daya pada tugas.	8. Menggunakan manusia sebagai faktor utama dalam menambah nilai.
9. Termotivasi oleh keuntungan.	9. Menfokuskan pada kepuasan pelanggan.
10. Menggantungkan pada kelancaran program.	10. Membangun cara hidup baru.

³⁰W. Mantja, *Manajemen Pendidikan*, hal. 30.

³¹Sonhaji, "Penerapan Total Quality Management dan ISO 9000 dalam Pendidikan Teknik", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid I No 8, (Malang: IKIP, STIKIP dan FKIP, 1999), hal. 23.

- a. *Quality Assurance*, yaitu mengacu pada penetapan standar, metode yang memadai, dan tuntutan mutu oleh sekelompok atau lembaga para pakar yang diikuti oleh proses pengawasan dan evaluasi yang memeriksa sejauh mana pelaksanaannya memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sesuatu yang penting dalam proses *Quality Assurance* adalah publikasi dari yang telah ditetapkan tersebut.
- b. *Contract Conformance*. Mutu standar harus ditetapkan secara spesifik melalui negosiasi dalam bentuk sebuah kontrak yang disepakati dalam lingkup kerja peningkatan mutu Perguruan Tinggi Islam. Mutu harus dilihat apakah terdapat kesesuaian dan komitmen dalam perumusan standar mutu yang spesifik tersebut.
- c. *Customer-driven Quality*, yaitu mengacu pada pemikiran mutu dari mereka yang menerima produk atau layanan. Produk atau layanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan dan kualitasnya ditentukan oleh klien. Produk atau layanan harus disesuaikan dengan tuntutan dan harapan para klien dan *stakeholders*.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pendekatan mutu menggiring Perguruan Tinggi Islam untuk mengenal dan mengimplementasikan beberapa model peningkatan mutu. Salah satu dari sekian model tersebut adalah *Quality Assurance* (penjaminan mutu).

Simpulan

Dalam prakteknya, peningkatan mutu di Perguruan Tinggi Islam pada umumnya menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 1) *Top Manajemen* Perguruan Tinggi Islam bersama-sama seluruh jajaran manajemen bawahannya menyusun visi dan misi lembaga; 2) Berdasarkan visi dan misi Perguruan Tinggi Islam tersebut, kemudian sebuah Perguruan Tinggi Islam menentukan Standar Mutunya; 3) Perguruan Tinggi Islam menetapkan organisasi dan mekanisme kerja penjaminan mutu; 4) Perguruan Tinggi Islam melaksanakan penjaminan mutu dengan menerapkan manajemen kendali mutu; 5) Perguruan Tinggi Islam

³⁴Primi Masrokan Mutohar, "Visionary Leadership Kepala Madrasah dalam Konteks Manajemen Peningkatan Mutu berbasis Madrasah", *Episteme*, Volume 1, Nomor 2, (Tulungagung: PPs STAIN Tulungagung, 1999), hal. 23.

mengevaluasi dan merevisi standar mutu melalui *benchmarking* secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ali, Attabik, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, (Edisi Lengkap), Yogya: Mukti Karya Grafika, 2003.
- Bawani, Imam, *Pasar Kerja Alumni Perguruan Tinggi Islam Islam*, Makalah disampaikan dalam Seminar Mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Tulungagung tahun 2005.
- Dikmenum Depdikbud, *Manajemen Peningkatan Mutu dalam suplemen 2 Pelatihan Kepala Sekolah Menengah Umum*, Jakarta: Depdikbud, 1999.
- James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, and Daniel R. Gilbert, *Manajemen*, terj. Alexander Sindoro, Jakarta: P. T. Bhuana Ilmu Populer, 1996.
- Komarayah, Aan, dan Cipi Triatna, *Visionary Leadership; Menuju Sekolah Efektif*, Jakarta: P. T. Bumi Aksara, 2005.
- Ministry of National Education, *Quality Improvement*, Website: <http://www.Pdd.Go.Id/ministry>.
- Muhaimin, *Manajemen Penjaminan Mutu di Universitas Islam Negeri Malang*, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005.
- ~, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam: Di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: P. T. Raja Grafindo Persada, 2005.
- ~, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Mutohar, Prim Masrokan, "Visionary Leadership Kepala Madrasah dalam Konteks Manajemen Peningkatan Mutu berbasis Madrasah", *Episteme*, Volume I, Nomor 2, Tulungagung: PPs STAIN Tulungagung, 1999.
- N. Bennet, M. Crawford & C. Riches, *Managingange in Education: Individual and Organization Perspectives*, London: Paul Chapman Publishing Co., 1992.
- Sagala, Saiful, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat; Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*, Jakarta: Nimas Multina, 2004.
- Salim, Peter, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, (Third Edition), Jakarta: Modern English Press, 1987.
- Shaleh, Abdul Rahman, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Sonhaji, "Penerapan Total Quality Manajement dan ISO 9000 dalam Pendidikan Teknik", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid I No 8, Malang: IKIP, STIKIP dan FKIP, 1999.
- Suderajat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Bandung: CV. Cipta Cekas Grafika, 2005.
- Suryobroto, B., *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Kedua), Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Tunggal, Amin Widjaja, *Audit Mutu (Quality Auditing)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Umaid, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Sebuah Pendekatan Baru dalam Pengelolaan Sekolah untuk Meningkatkan Mutu*, Internet/mbs/artiket pendidikan Network. Mbs. Htm. 1999
- Uwes, Sanusi, *Manajemen Pengembangan Mutu Dosen*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.